

## **Peran Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan di Indonesia**

**Firman Mansir**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Address: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55183

*e-mail: firmanmansir@umy.ac.id*

**DOI: 10.22373/jie.v5i2.10846**

## **The Role of Islamic Education in the Implementation of Educational Autonomy in Indonesia**

### **Abstract**

This article describes the role of Islamic education in the implementation of educational autonomy that occurs in Indonesia, both in Islamic educational institutions and in general education institutions. The results of the study indicate that Islamic education plays a major role in the implementation of educational autonomy. This is because Islamic education is a separate part that is able to implement its curriculum in Islamic educational institutions. This research is a literature study so that the data analyzed are sourced from various literature references by using literature analysis in revealing the data. Thus, the implementation of educational autonomy in various Indonesian educational institutions goes well together in accordance with the educational and learning objectives to be achieved. In the context of Islamic education itself, the entire PAI curriculum is able to synergies with other subjects implemented in schools and madrasa.

**Keywords:** *Islamic Education, Educational Autonomy, Indonesia*

### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan tentang peran pendidikan Islam dalam pelaksanaan otonomi pendidikan yang terjadi di Indonesia baik di lembaga pendidikan Islam maupun di lembaga pendidikan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan besar terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan karena pendidikan Islam bagian tersendiri yang mampu menerapkan kurikulumnya di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga data-data yang dianalisis bersumber dari berbagai referensi kepustakaan dengan menggunakan analisis literatur dalam mengungkap data tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi pendidikan

di berbagai lembaga pendidikan Indonesia berjalan dengan baik saling beriringan sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam konteks pendidikan Islam sendiri, seluruh kurikulum PAI mampu bersinergi dengan mata pelajaran lain yang diimplementasikan di sekolah dan madrasah.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Islam, Otonomi Pendidikan, Indonesia*

## **A. Pendahuluan**

Secara teori ilmu pendidikan, bahwasanya pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses yang terus menerus, dari umur usia dini hingga dewasa di kehidupan manusia.<sup>1</sup> Islam sendiri sangat menjunjung tinggi terhadap pendidikan terlebih pada proses pertumbuhan dari awal mulanya benih hingga menjadi pribadi per individu pada kehidupan yang nyata.<sup>2</sup> Dalam pembinaan pendidikan dan kepribadian yang paling berperan nomor satu yaitu orangtua, dan usaha yang mengembangkan dan membina pribadi individu itu ialah sekolah dan masyarakat yang diantaranya terdiri dari aspek jasmaniah. Pada hakikatnya tidak ada seorang di dunia yang tercipta secara langsung secara sempurna tanpa adanya suatu proses. Kesempurnaan dan kematangan dititiberatkan pada memaksimalkan potensi dan kemampuan pada satu individu itu, sehingga keserasian dan keseimbangan manusia yang dioptimalisasikan pada makna tujuan pendidikan.<sup>3</sup>

Proses pertumbuhan dan pengembangan hidup manusia merupakan salah satu faktor penting pada pendidikan.<sup>4</sup> Terdapat bermacam cara untuk mewujudkan agar mimpi dan cita-cita pertumbuhan dan perkembangan bibit-bibit bangsa semakin lebih baik, sehingga menjadi menarik perhatian yang dominan untuk mengembangkannya. Tetapi, disisi lain dalam mengembangkan pendidikan itu ada beberapa titik rintangan dan tantangan yang dilaluinya, dan juga dilakukan bermacam cara dan usaha dalam melewati hambatan tersebut.<sup>5</sup> Terlebih seperti saat ini yang tengah kita rasakan, di

---

<sup>1</sup> Nurul Yaqin, "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2016): 93–105.

<sup>2</sup> Firman, Mansir. 2020. "Diskursus Sains Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah Era Digital". *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3 (2). Denpasar:144-57. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v3i2.437>.

<sup>3</sup> Abdul Rahman, "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi dan isi Materi", *Jurnal Eksis*, Vol.8 No.1, Maret 2012: 2001 – 2181.

<sup>4</sup> Muchammad Toha and Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam Di Kota Metropolitan: Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI Di Surabaya* (Inteligensia Media, 2020).

<sup>5</sup> H Prayitno, "Dasar Teori Dan Praksis Pendidikan," *Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia*, 2009.

tengah beberapa polemik, ujian dan problematika yang terjadi pada negeri ini, sehingga semua aspek itu juga bertanggungjawab agar menjadi satu formulasi yang juga menjadi satu kekuatan agar dapat melewati dari sekian polemik dan permasalahan yang terjadi pada masa pengembangan pendidikan.

Pendidikan Islam sendiri seringkali dipandang secara tertutup.<sup>6</sup> Dalam konteks otonomi pendidikan maka pendidikan Islam merupakan usaha melalui beberapa kegiatan pembelajaran supaya ajaran agama Islam bisa dijadikan pandangan bagi kehidupan masyarakat sebagai bekal dalam taat beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>7</sup> Pada sisi lain juga, pendidikan Islam diartikan secara terbuka<sup>8</sup>, yaitu sebagai upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir peserta didik dengan segala kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya. Tujuannya agar memenuhi amanat serta tanggung jawab dalam pengabdian kepada Allah SWT. Seluruh masyarakat muslim memiliki sebuah kewajiban untuk kembali kepada perencanaan pendidikan Islam sebab keberadaan pendidikan Islam di otonomi pendidikan didorong untuk menjadi aspek yang mampu membangun dan mengembangkan, bukan malah menjadi serangan balik terhadap pesatnya kemajuan era global.<sup>9</sup>

Otonomi merupakan pemberian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional untuk membenahi sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah menggapai efektivitas dan efisiensi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Dengan begitu, tujuan yang perlu dicapai dalam pemberian urusan tersebut antara lain mengembangkan daerah dalam berbagai bidang serta memberi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, memberikan kesempatan kepada daerah agar tumbuh mandiri dan meningkatkan daya saing daerah dalam menuju kemajuan yang lebih baik.

Oleh karena itu, lahirnya otonomi pendidikan di zaman modern ini akan terus menerus berkembang dan tidak akan memandang siapa yang akan menjadi

---

<sup>6</sup> Firman Mansir and Halim Purnomo, "Optimalisasi Peran Guru PAI Ideal Dalam Pembelajaran Fiqh Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 5, no. 2 (2020): 97–105, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5692](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5692).

<sup>7</sup> Dede Rosyada, *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah* (Kencana, 2017).

<sup>8</sup> Firman Mansir, "Analisis Model-Model Pembelajaran Fikih Yang Aktual Dalam Merespons Isu Sosial Di Sekolah Dan Madrasah," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2021): 88–99.

<sup>9</sup> Hartono Hartono, "Otonomi Pendidikan," *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 51–66.

pengikutnya, dan kemajuan pendidikan yang akan mampu menghancurkan segala yang menghambatnya.<sup>10</sup> Berkaitan dengan hal itu, maka tujuan pendidikan Islam sebagai pembentukan karakter terhadap peserta didiknya<sup>11</sup>, dapat mendorong sikap percaya diri dalam menjalani setiap aktifitas, pendidikan ini akan terus berlanjut untuk menumbuhkan sikap bersosialisasi peserta didik di lingkungan masyarakatnya dan membentuk serta menumbuhkan dalam usaha menggapai cita-cita mereka. Sehingga menjadikan generasi bangsa yang mampu mendorong dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain. Karena itu pendidikan Islam menjadi kunci penting dan memberi bukti dari kemajuan suatu negara, maka dari itu semua masyarakat pembelajar harus membangunnya sebaik mungkin.<sup>12</sup>

Dengan demikian, lahirnya tuntutan masyarakat Indonesia dalam hal demokratisasi pendidikan yang berharap lahirnya perubahan sektor lembaga pendidikan. Namun disisi lain perubahan tingkah laku peserta didik yang demokratis dituntut agar hubungan demokratis antara guru dengan peserta didik dapat memiliki perkembangan berpikir kreatif, pendidikan agama yang mengukir nilai-nilai moral dengan landasan iman dan takwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta mampu bersaing secara global. Ini semua pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam sejak dahulu sampai hari ini. Otonomi pendidikan selain mendorong demi kemajuan lembaga pendidikan, tetapi juga mendorong SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Karena itu metode yang digunakan analisis data adalah metode penelitian pustaka. Fokus penulisan dalam artikel ini ditulis berdasarkan dari beberapa jurnal, artikel dan buku yang didasari atas kajian-kajian. Karena itu data kualitatif tekstual yang berupa pemikiran dan pandangan yang tertulis dalam bahan pustaka dikumpulkan dalam penulisan artikel ini. Teknik dokumenter termasuk teknik pengumpulan data yang

---

<sup>10</sup> H Hasan Baharun, "Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Tarbiyah" At-Tajdid* 1, no. 2 (2012): 242.

<sup>11</sup> (Mansir, 2018).

<sup>12</sup> Firman Mansir and Abdul Karim, "Islamic Education Learning Approaches in Shaping Students' Emotional Intelligence in the Digital Age," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 67–86.

digunakan yakni dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan sebagai daftar pustaka. Beberapa jurnal dan buku yang digunakan sebagai bahan pustaka di dalamnya menjelaskan tentang pendidikan Islam dan otonomi pendidikan. Dalam analisis data dilakukan secara deduktif dengan tujuan untuk memperoleh pembahasan dan gambaran tentang pendidikan Islam dan pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia yang implementasinya pada lembaga pendidikan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada beberapa pandangan mengenai makna dan interpretasi tentang pendidikan Islam di lembaga pendidikan baik di sekolah maupun madrasah serta makna pendidikan agama Islam.<sup>13</sup> Sebagai bagian dari pendidikan Islam dalam implementasinya di sekolah dan madrasah.<sup>14</sup> Pandangan-pandangan tersebut dapat diuraikan dan disimpulkan sebagai berikut: Menurut Muhaimin bahwasanya Pendidikan agama Islam bermakna usaha bagaimana mengajar dan mendidik perihal agama Islam serta nilai-nilainya agar sikap dan pandangan hidup seseorang itu baik. Dari sini usaha-usaha yang diupayakan seperti yang telah disebutkan ditujukan untuk membantu satu individu atau kelompok untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam sebagai patokan hidupnya.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut Harun Nasution bahwasannya tujuan pendidikan agama Islam di sekolah antara lain menjadikan manusia yang bertakwa, yaitu sebagai insan yang bertakwa kepada Allah SWT dalam menunaikan segala amal ibadahnya dengan cara menjadikan diri sebagai pribadi yang memiliki akhlak yang terpuji.<sup>16</sup>

Dalam perspektif yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh al-Sya'bani bahwasannya Upaya pendidikan agar tercapainya seseorang atau individu yang baik tingkah laku, perbuatan, dan segala pergerakannya pada masyarakat ataupun alam sekitar. Menurut al Nahlawi bahwasannya pendidikan Islam bertujuan agar menjadikan individu maupun kelompok agar masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan menjadikannya baik dilihat dari perseorang maupun masyarakat. Pandangan yang lain

---

<sup>13</sup> Siti Suwaibatul Aslamiah, "Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2013): 5.

<sup>14</sup> (Mansir, 2018) Diskursus Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada Era Milenial, Jurnal Tadrib.

<sup>15</sup> Muhaimin Muhaimin, *Pemikiran Dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Rajawali Press, 2011).

<sup>16</sup> Muhammad Husnol Hidayat, "Harun Nasution Dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 23–38.

menurut Muhammad Fadhil Al- Jamaly bahwasanya Pendidikan Islam yakni sebagai usaha untuk menanamkan dan menumbuhkan kepada peserta didik agar hidup menjadi lebih berarti dengan dasar ajaran serta nilai yang baik di kehidupan nyata. Dengan adanya upaya ini, diharapkan agar terbentuk individu-individu yang lebih baik dari segala sisi.<sup>17</sup>

Menurut Ahmad D. Marimba bahwasannya Pendidikan Islam ialah ajaran dan pembelajaran secara sadar kepada para peserta didik terhadap pertumbuhan mental maupun fisik sehingga terbentuk pribadi yang baik. Menurut Ahmad Tafsir bahwasannya “ Pendidikan Islam ialah tuntunan yang diberikan pada individu atau kelompok agar tumbuh menjadi pribadi versi terbaiknya yang juga sesuai dengan ajaran agama Islam sendiri <sup>18</sup>. Dari berbagai pendapat dan pandangan di atas tentang pendidikan agama Islam dan arah pendidikan Islam di lembaga pendidikan<sup>19</sup>, maka ada beberapa suatu kesamaan diantara arti dari pandangan tersebut diantaranya: Terdapat proses pengembangan ilmu dan pendidikan secara berlanjut, terdapat hubungan antara dua belah pihak dalam hal ini pihak pertama: pendidik dan orangtua dan pihak kedua: peserta didik, dan terakhir terdapat penanaman serta pembinaan potensi, nilai-nilai religiusitas dalam pikiran juga jiwa dan tujuan akhirnya ialah akhlakul karimah.<sup>20</sup>

### **1. Regulasi dan Perinsip Otonomi Pendidikan dan Pelaksanaannya di Sekolah**

Otonomi daerah yang berada di Indonesia sendiri diwujudkan dengan cara berbagi satu dengan yang lainnya, aspek kekuasaan yang pada akhirnya terfokuskan pada pemerintahan pusat dengan mengumpulkan sebagian dari hak dan tugas kepada pemerintah daerah. Seperti yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sendiri, bahwasannya yang memiliki hak pemerintah pusat hanya bagian terkecil yang bersifat penting seperti beberapa hal yaitu urusan keamanan, moneter, keadilan, pertahanan, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan aspek-aspek kepentingan sendiri.<sup>21</sup> Karena itu, Pengertian otonomi sendiri memiliki sifat yang multi dimensional, yang bermakna bahwasanya otonomi diberlakukan untuk seluruh aspek

---

<sup>17</sup> Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam* (IRCiSoD, 2018).

<sup>18</sup> (Rahman, 2012) Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi isi dan Materi.

<sup>19</sup> Muhammad Usman and Anton Widyanto, “Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Lhokseumawe,” *DAYAH: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (January 24, 2019): 36–52, <https://doi.org/10.22373/JIE.V2I1.2939>.

<sup>20</sup> Rahman, “Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi Dan Isi-Materi.”

<sup>21</sup> Hartono, “Otonomi Pendidikan.”

kehidupan dan segala kebutuhan anata lain terdiri dari aspek individual ataupun keluarga untuk menentukan tempat berteduh, mencari pasangan, menentukan sandangnya dan antara lain yang paling penting ialah memilih dan menentukan bagaimana pendidikannya. Oleh sebab itu, makna otonomi pendidikan ialah bagaimana cara setiap daerah-daerah di Indonesia dapat membina dan mengelola pendidikan.<sup>22</sup>

Karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya otonomi pendidikan memiliki makna yang luas, yang diantaranya memiliki aspek filosofi, format, dan tujuan dari manajemen serta pendidikan itu sendiri. Implementasinya antara lain tiap-tiap daerah otonomi wajib memiliki visi, misi pendidikan itu sendiri sehingga memiliki pandangan yang jelas sehingga masyarakat sendiri memiliki masa depan dan dapat memperkirakan bagaimana mengenyam pendidikan itu. Sebuah kemandirian biasanya diawali dengan analisis diri sehingga dapat mengevaluasi apa yang diperbuat sehingga dapat menyusun satu siasat yang matang dan baik melalui otonomi pendidikan yang terbaik.<sup>23</sup>

Dalam otonomi daerah (desentralisasi) terdapat prinsip yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 1 tentang Asas asas otonomi daerah Nomor 05 Tahun 1974 ialah sebagai berikut: Asas Deskontruksi, pejabat pemerintah pusat daerah yang dilimpahkan kekuasaannya oleh pemerintah pusat, dan peralihan pemerintah pusat ke daerah. Asas bantuan dan pekerjaan rumah tangganya yakni pemerintah pusat mengalihkan pada desa dan daerah untuk mengerjakan tugas yang telah ditentukan yang disertai sarana, prasarana, dana, SDM dan wajib bertanggungjawab pada orang yang telah ditugaskannya. Hal ini menjadikannya pengawasan pemerintah daerah untuk memberikan penekanan pada prinsip itu sendiri. Dengan seperti itu perkembangan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terjamin. Sehingga dapat terbentuknya satu kesetaraan dan inisiatif dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dalam kajiannya otonomi daerah sendiri dapat diartikan nyata, luas dan tanggungjawab. Disebut ekstensif dikarenakan kekuasaan yang menyangkut kehidupan, pertumbuhan dan kebutuhan kekuasaan yang tersisa milik pemerintah pusat disebut negatif. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang ideal harus memiliki

---

<sup>22</sup> Marus Suti, "Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan," *Jurnal Medtek* 3, no. 2 (2011): 1–6.

<sup>23</sup> Bernadainty D Polii, "Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pada Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia," *PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8, no. 2 (2016): 430–35.

<sup>24</sup> Baharun, "Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam."

tanggungjawab dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat, memelihara hubungan antar satu dengan lainnya, mengembangkan kehidupan, sehingga hal tersebut harus dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat.

Lingkungan yang berada di sekitar kita akan selalu berubah dengan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi selama ini. Oleh sebab itu, pendidikan yang ada juga harus terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan agar tidak tertinggal dengan perubahan yang sedang berlangsung terutama pada era revolusi industri saat ini dimana semua hal mengalami perubahan dengan sangat cepat sehingga ada banyak hal yang menjadi tertinggal dengan sangat cepat. Sebelumnya pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum 2006 atau sering kita sebut sebagai KTSP.<sup>25</sup> Contoh Jenis kurikulum 2006 atau KTSP merupakan salah satu kurikulum yang sudah bertahan lama yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

KTSP ini memberikan kebebasan kepada setiap guru untuk menentukan kurikulum yang dibutuhkan pada setiap siswa<sup>26</sup>, dan memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap individu dan tidak terlupakan lingkungan tempat mereka melakukan metode pendidikan yang diterapkan. Karena kurikulum ini sudah diadopsi cukup lama dan kurang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, sehingga dibentuk dan diterapkan kurikulum yang baru yakni kurikulum 2013 yang mana kurikulum ini sangat menekankan bagaimana cara pendidikan karakter setiap siswa ini dibentuk, skill yang diperlukan untuk terjun di lingkungan masyarakat. Kemampuan yang dimiliki setiap siswa untuk memahami setiap materi yang diberikan, serta kemampuan untuk mempresentasikan sehingga mampu mengelola kemampuan publik speaking masing-masing individu, dan memiliki sopan santun.

Oleh karena itu, kaitannya dengan otonomi pendidikan dan merespon zaman ini, maka segala sesuatu berjalan sangat cepat sehingga dirasa kurangnya penyaringan yang bisa dilakukan terhadap kebudayaan yang masuk di Indonesia. Hal ini diharapkan dengan adanya kurikulum, setiap siswa mampu memiliki sopan santun yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia yang mengenal kata Otonomi Daerah, hal-hal yang berkaitan dengan wilayah setiap pemimpin daerah tentunya akan menjadi kuasa milik pemimpin daerah tersebut. Tak terkecuali yang berkaitan terhadap proses

---

<sup>25</sup> (Mansir, 2020) Identitas Guru PAI Abad 21 yang Ideal pada Pembelajaran Fiqh di Sekolah dan Madrasah, *Jurnal Muslim Heritage*.

<sup>26</sup> Firman Mansir, "The Response Of Islamic Education To The Advancement Of Science In The Covid-19 Pandemic Era In The Islamic Boarding Schools," *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 8, no. 1 (n.d.): 20–27.

pengangkatan para kepala sekolah untuk lembaga pendidikan, pemberdayaan yang dilakukan untuk setiap kepala sekolah yang terpilih, serta dilakukannya pemberhentian kepala sekolah yang sudah memenuhi syarat menjadikan semua hal itu menjadi kewenangan setiap pemimpin daerah baik itu kewenangan milik Bupati maupun Gubernur setempat.

## **2. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam**

Pada masa seperti saat ini, masa dimana orang melakukan pilihan rasional pada alam demokrasi, dan titik terpentingnya ada di dalam dunia pendidikan. Setiap orang tidak hanya memilih atas hubungan individual maupun berkelompok dengan paham pemikiran masing-masing. Jika sebelumnya lembaga pendidikan diakui oleh masyarakat. Maka masyarakat akan memberikan pendapat masing-masing pada lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus bisa melihat, menerima dan terbuka atas segala tuntutan yang benar dari masyarakatnya. Kualitas pendidikan akan ditentukan pada era otonomi oleh kebijakan pemerintahan daerah. Terdapat peluang yang tinggi pada daerah yang bersangkutan akan maju pada saat pemerintah daerah memiliki political will yang kuat dan baik pada dunia pendidikan dan sebaliknya, jika suatu daerah mengalami kendala dan hambatan pada pemberdayaan masyarakat sehingga tidak dapat berkembang dengan baik, hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mempunyai satu visi yang baik pada bidang pendidikan.<sup>27</sup>

Dalam aspek mutu pendidikan, terdapat problematika yakni Undang-undang otonomi daerah tersebut apakah akan mendapatkan penjaminan mutu pendidikan masing-masing daerah, dan terkhusus pada lembaga pendidikan Islam<sup>28</sup>, yang slogannya kurang siap terutama untuk masuk ke standar nasional dan internasional dengan adanya persaingan yang ketat, di sisi lain kualitas sarana prasarana, kemampuan dan sumber dayanya yang jauh berbeda. Pada aspek pemerataan, peningkatan aspirasi masyarakat pada otonomi di bidang pendidikan juga bersama dalam peningkatan prolehan pemerataan masyarakat. Akan tetapi, jika tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan aspek fasilitas pendidikan maka semakin dibayar mahal sehingga terdapat kecacatan pada mutu hasil pendidikan. Tanpa ada pengelolaan yang tepat, masyarakat

---

<sup>27</sup> Baharun, "Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam."

<sup>28</sup> Saida Manilet, "Problematika Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga Di Desa Morella Kabupaten Maluku Tengah," *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 34–52.

atau warga di suatu daerah atau kota yang sedikit jumlah penduduknya maka lebih leluasa untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

Implikasi pada otonomi pendidikan di Indonesia, memiliki batu loncatan tersendiri bagi satu lembaga pendidikan Islam agar dapat tetap bertahan dan eksis pada masa persaingan global dengan memberi pilihan dan cara terbaru. Hal ini dikarenakan jika tidak melakukannya lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah akan terkalahkan oleh berbagai lembaga pendidikan umum, disana lebih menawarkan dan memberikan hal dan fasilitas yang lebih menarik pada dunia kependidikan. Minimnya penyelenggaraan renovasi dalam sisi kurikulum ini, selain hal-hal yang bersangkutan seperti di atas juga disebabkan oleh minimnya kualitas SDM atau sumber daya manusia yang ada pada beberapa daerah, sehingga menyebabkan penghambatan pada pengayaan dan pengembangan terhadap kurikulum yang ada.

Oleh sebab itu, perlu mengandalkan usaha lebih dari beberapa lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Usaha yang dimaksudkan contohnya ialah melakukan cara-cara terbaru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat. Dengan seperti ini, pengayaan dan renovasi kurikulum lembaga pendidikan Islam<sup>29</sup>, yang ada di daerah-daerah akan diapresiasi terhadap kebutuhan daerah. Selanjutnya permasalahan yang dialami oleh lembaga pendidikan Islam pada daerah-daerah yang berkaitan dengan kemauan dan kebijakan pemerintah (*politic will*) dalam pengusahaan untuk memajukan dan menopang pendidikan yang berada di daerahnya.

Pada realitanya, para guru akan menghadapi berbagai permasalahan, khususnya guru Pendidikan Agama Islam<sup>30</sup>, daerah-daerah yang pemerintahannya kurang dalam memperhatikan sisi pendidikannya, sehingga dana yang dikeluarkan untuk APBD di bidang pendidikan sangatlah sedikit. Hal seperti ini menjadikan lama dan lambatnya pada pertumbuhan dari bidang pendidikan yang ada di daerah, sehingga mengakibatkan masyarakat atau warganya yang kurang baik dalam sumber daya manusia. Dalam menghadapi permasalahan yang rumit ini, hal seperti ini akan menjadi tanggungjawab masyarakat suatu daerah untuk memberikan kontribusi dan masukan untuk pemerintah

---

<sup>29</sup> Ahmad Yusuf, "Konseptualisasi Model Pendidikan Islam Integratif Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Indonesia," *DAYAH: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2021): 233–54.

<sup>30</sup> (Mansir, 2020) *The Leadership of Personnel Management in Islamic Education: Emerging Insight From an Indonesian University*, Jurnal Edukasia Islamika.

daerah dalam meningkatkan dan memperhatikan APBD pada bidang pendidikannya. Cara seperti ini diharapkan bisa menyadarkan pemerintah untuk mengusahakan kemajuan pada bidang pendidikan. Karena itu peran kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi seperti ini.<sup>31</sup>

Realita seperti ini sangat tepat menjadi permasalahan pada daerah yang pengembangan pendidikan sudah berlangsung sehingga dapat berkaitan dengan sedikitnya pendapatan atau penghasilan pada daerah tersebut. Bahkan secara psikologi Islam ini bisa memberi dampak.<sup>32</sup> Lalu jika hal seperti itu terjadi maka hal yang harus dilakukan ialah pemerintah daerah berkonsultasi pada pemerintah pusat bagaimana kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Hal yang berkaitan pada persiapan unsur pendidikan untuk menghadapi persaingan global di beberapa daerah. Suatu daerah akan jauh tertinggal jika dibanding daerah yang lainnya apabila tidak siap dan tidak mampu untuk menyiapkan persiapan beberapa tenaga profesional untuk bidang pendidikannya. Hal ini tengah dialami pada saat ini ialah pendidikan yang terdapat pada daerah tidak membuahkan produk dan hasil yang profesional dan maksimal di bidangnya.

Oleh sebab itu, hal yang telah disebutkan wajib menjadi notulensi penting untuk satu lembaga pendidikan Islam yang berada di beberapa daerah sehingga mempunyai strategi dan siasat yang ampuh untuk mempersiapkan tenaga profesional yang baik di beberapa bidang pada era otonomi pendidikan. Dengan begitu, cara menganalisa terhadap kekurangan daerah pada agenda studi banding dengan daerah lain untuk menindaklanjuti bagaimana cara pengayaan keterampilan kerja yang baik dan benar serta profesional.<sup>33</sup> Selain itu optimalisasi guru Pendidikan Agama Islam perlu ditingkatkan dalam menghadapi pembelajaran mandiri<sup>34</sup>, sebab dengan adanya kuasa penuh daerah maka para guru PAI suka tidak suka harus ikut daerah setempat.

#### **D. Simpulan**

Pendidikan Islam dan pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan relnya masing-masing, sehingga tidak mengganggu antara

---

<sup>31</sup> (Mansir, 2020) Diskursus Sains Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah Era Digital, Kamaya: Jurnal Ilmu Agama

<sup>32</sup> (Mansir, 2018) Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam, Psikis: Jurnal Psikologi Islami

<sup>33</sup> Baharun, "Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam."

<sup>34</sup> Mansir and Purnomo, "Optimalisasi Peran Guru PAI Ideal Dalam Pembelajaran Fiqh Di Masa Pandemi Covid-19."

satu dengan lainnya. Adanya keberhasilan ini dapat membuktikan bahwa Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena di satu sisi Pendidikan Agama Islam mendapat pengakuan dalam sistem pendidikan nasional, akibatnya muatan dan jatah Pendidikan Agama Islam mendapat porsi dan kedudukan yang tinggi. Karena itu otonomi pendidikan di Indonesia memiliki makna yang luas, yang diantaranya memiliki aspek filosofi dalam rangka melihat kebijakan pendidikan itu melalui pemikiran dan nalar manusia. Selain itu, format, dan tujuan dari manajemen pendidikan serta evaluasi pendidikan itu sendiri memberikan kontribusi besar dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah. Sementara itu implementasinya antara lain tiap-tiap daerah otonomi wajib memiliki visi misi pendidikan dalam rangka memiliki pandangan yang jelas dan jauh ke depan sehingga masyarakat merasa memiliki masa depan yang cerah akan pentingnya pendidikan. Dengan demikian di beberapa daerah bahkan mempunyai strategi dan siasat yang ampuh untuk mempersiapkan tenaga profesional yang baik di beberapa bidang pada era otonomi pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Yanuar. *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*. IRCiSoD, 2018.
- Aslamiyah, Siti Suwaibatul. "Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2013): 5.
- Baharun, H Hasan. "Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Tarbiyah" At-Tajdid* 1, no. 2 (2012): 242.
- Hartono, Hartono. "Otonomi Pendidikan." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 51–66.
- Hidayat, Muhammad Husnol. "Harun Nasution Dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 23–38.
- Manilet, Saida. "Problematika Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga Di Desa Morella Kabupaten Maluku Tengah." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 34–52.
- Mansir, Firman. "Analisis Model-Model Pembelajaran Fikih Yang Aktual Dalam Merespons Isu Sosial Di Sekolah Dan Madrasah." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2021): 88–99.

- . “Diskursus Pendidikan Karakter Di Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Pada Era Milenial.” *Tadrib* 4, no. 2 (2018): 280–300.
- . “Diskursus Sains Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah Era Digital.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 3, no. 2 (2020): 144–57.
- . “Identitas Guru PAI Abad 21 Yang Ideal Pada Pembelajaran Fiqh Di Sekolah Dan Madrasah.” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 435.
- . “Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam.” *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1 (2018): 61–73.
- . “The Leadership of Personnel Management in Islamic Education: Emerging Insights from an Indonesian University.” *Edukasia Islamika*, 2020, 1–16.
- . “The Response Of Islamic Education To The Advancement Of Science In The Covid-19 Pandemic Era In The Islamic Boarding Schools.” *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 8, no. 1 (n.d.): 20–27.
- Mansir, Firman, and Abdul Karim. “Islamic Education Learning Approaches in Shaping Students’ Emotional Intelligence in the Digital Age.” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 67–86.
- Mansir, Firman, and Halim Purnomo. “Optimalisasi Peran Guru PAI Ideal Dalam Pembelajaran Fiqh Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 5, no. 2 (2020): 97–105. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5692](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5692).
- Muhaimin, Muhaimin. *Pemikiran Dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Rajawali Press, 2011.
- Polii, Bernadainty D. “Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pada Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.” *PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8, no. 2 (2016): 430–35.
- Prayitno, H. “Dasar Teori Dan Praksis Pendidikan.” *Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia*, 2009.
- Rahman, Abdul. “Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi Dan Isi-Materi.” *Jurnal Eksis* 8, no. 1 (2012): 2053–59.
- Rosyada, Dede. *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*. Kencana, 2017.
- Suti, Marus. “Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan.” *Jurnal Medtek* 3, no. 2 (2011): 1–6.
- Toha, Muchammad, and Masdar Hilmy. *Pendidikan Islam Di Kota Metropolitan: Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI Di Surabaya*. Inteligencia Media, 2020.

Usman, Muhammad, and Anton Widyanto. "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Lhokseumawe." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (January 24, 2019): 36–52. <https://doi.org/10.22373/JIE.V2I1.2939>.

Yaqin, Nurul. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2016): 93–105.

Yusuf, Ahmad. "Konseptualisasi Model Pendidikan Islam Integratif Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Indonesia." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2021): 233–54.